

**MENATAP MASA DEPAN BULELENG MELALUI SEKTOR
INFRASTRUKTUR DAN KEBERLANJUTAN LAHAN PANGAN?**



**DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
BULELENG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buleleng adalah salah satu kabupaten di Bali, memiliki sejarah panjang terkait dengan penguasaan tanah dan konflik agraria. Sejak era kolonial Belanda, banyak lahan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, meninggalkan masyarakat lokal dalam ketidakpastian hukum mengenai hak atas tanah mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, lahan subak di Buleleng mengalami tekanan akibat konversi lahan untuk pembangunan dan perubahan fungsi lahan menjadi area non-pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas lahan subak yang tersisa serta menurunnya produktivitas pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa banyak petani menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya dan dukungan teknis untuk mengelola lahan mereka secara efektif. Pembangunan infrastruktur juga menjadi isu penting di Buleleng. Rencana pembangunan bandara baru di Gerokgak memicu ketegangan antara pemerintah dan warga, karena proyek tersebut berpotensi merusak lahan pertanian dan mematikan UMKM lokal. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam merencanakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Pelabuhan Buleleng, yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, memiliki sejarah yang kaya sebagai pusat pelayaran dan jalur perdagangan. Letaknya yang strategis di pantai utara Bali menjadikannya sebagai titik vital untuk perdagangan lokal dan internasional. Pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang, tetapi juga sebagai pusat administrasi untuk ekspor dan impor, yang menghubungkan Bali dengan berbagai wilayah di luar pulau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbullah suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana kepastian lahan pangan berkelanjutan yang ada di kabupaten Buleleng sebagai daerah agraris?
- 1.2.2. Bagaimana dampak pembangunan Bandara Bali Utara terhadap pemerataan pembangunan di Buleleng?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kepastian Lahan Pangan Berkelanjutan Yang Ada Di Kabupaten Buleleng Sebagai Daerah Agraris

berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Buleleng memberikan dampak signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Salah satu dampak paling langsung dari berkurangnya lahan pertanian adalah penurunan produksi pangan, khususnya beras. Data menunjukkan bahwa luas lahan sawah produktif di Buleleng mengalami pengurangan, dari 10.335 hektare pada tahun 2019 menjadi sekitar 9.540 hektare pada tahun 2023.

Penurunan ini berdampak pada produksi beras yang menurun drastis, dari 46.159 ton pada tahun 2018 menjadi hanya 35.254 ton pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada pasokan beras dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan lokal. Dengan berkurangnya lahan pertanian, ketahanan pangan daerah menjadi terancam. Penurunan produksi pangan lokal dapat mengakibatkan kekurangan pasokan makanan, yang berpotensi meningkatkan harga pangan dan mempengaruhi aksesibilitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Ketergantungan pada pasokan luar juga dapat mengganggu stabilitas pasokan pangan di Buleleng. Berkurangnya lahan pertanian berdampak negatif pada ekonomi lokal. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi banyak penduduk di Buleleng. Penurunan produktivitas pertanian dapat mengurangi pendapatan petani dan meningkatkan angka pengangguran di sektor pertanian.

Selain itu, sektor industri pengolahan hasil pertanian juga akan terpengaruh, mengingat berkurangnya bahan baku yang tersedia untuk diolah. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti perumahan atau infrastruktur lainnya, dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Hal ini sering kali mengarah pada pergeseran budaya agraris ke arah urbanisasi, di mana masyarakat lebih fokus pada kegiatan non-pertanian. Perubahan ini dapat mengurangi nilai-nilai tradisional yang berkaitan dengan pertanian dan komunitas pedesaan.

Konversi lahan pertanian juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan penurunan kualitas tanah. Dengan berkurangnya area hijau, risiko erosi tanah dan pencemaran air meningkat, yang berdampak negatif pada ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Buleleng memiliki dampak signifikan yang mencakup penurunan produksi pangan, ancaman terhadap ketahanan pangan, dampak ekonomi yang merugikan petani, perubahan sosial dalam masyarakat, serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan

untuk mengambil langkah strategis dalam melindungi dan mempertahankan lahan pertanian demi keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat Buleleng.

2.2 Bagaimana dampak pembangunan Bandara Bali Utara terhadap pemerataan pembangunan di Buleleng

Pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng telah menjadi topik perdebatan yang hangat, mengingat potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Yaitu

1. Dampak Lingkungan

- **Kerusakan Habitat:** Rencana pembangunan bandara di dekat Taman Nasional Bali Barat berpotensi merusak habitat satwa dan flora yang dilindungi. Sekitar 64 hektar lahan dalam taman nasional direncanakan akan digunakan, yang dapat mengganggu ekosistem lokal dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati
- **Pencemaran:** Aktivitas konstruksi dan operasional bandara dapat menyebabkan pencemaran udara dan suara, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pencemaran ini dapat berasal dari emisi kendaraan berat serta limbah konstruksi yang tidak dikelola dengan baik.

2. Sosial dan Ekonomi

- **Pengusuran Warga:** Meskipun pihak pengembang menjanjikan bahwa tidak ada warga yang akan kehilangan lahan mereka, banyak kekhawatiran bahwa proyek ini akan memicu pengusuran atau perubahan penggunaan lahan yang merugikan masyarakat lokal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan konflik antara masyarakat dan pengembang.
- **Ketidakadilan Ekonomi:** Banyak pihak, termasuk Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa pembangunan bandara lebih menguntungkan investor dan sektor pariwisata daripada masyarakat lokal. Ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi di Buleleng, di mana keuntungan dari proyek tidak secara langsung dirasakan oleh penduduk setempat

3. Ketidakpastian Infrastruktur

- **Aksesibilitas:** Lokasi bandara yang jauh dari pusat kota Denpasar dapat menimbulkan masalah aksesibilitas. Infrastruktur jalan yang ada mungkin tidak memadai untuk mendukung arus wisatawan dan barang, sehingga mengurangi efektivitas bandara sebagai pintu gerbang baru.
- **Overcapacity Bandara Eksisting:** Beberapa pengamat berpendapat bahwa Bandara I Gusti Ngurah Rai masih dapat ditingkatkan kapasitasnya tanpa perlu membangun bandara baru. Jika Bandara Bali Utara dibangun, bisa jadi akan terjadi overcapacity di kedua bandara, mengakibatkan pemborosan sumber daya

4. Dampak Budaya

- **Perubahan Gaya Hidup:** Pembangunan bandara dapat membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat lokal, terutama jika pariwisata berkembang pesat. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal dan tradisi pertanian yang telah ada selama bertahun-tahun.
- **Komodifikasi Budaya:** Dengan meningkatnya pariwisata, ada risiko bahwa budaya lokal akan dikomersialisasi untuk menarik wisatawan, mengubah cara hidup masyarakat asli.

5. Risiko Finansial

- **Pemborosan Anggaran:** Kritik terhadap proyek ini menyebutkan bahwa pembangunan bandara dapat menjadi pemborosan anggaran pemerintah jika tidak disertai dengan rencana yang matang dan analisis kelayakan yang komprehensif
- Jika bandara tidak mampu menarik cukup penumpang atau penerbangan, maka investasi besar tersebut bisa menjadi sia-sia.

Kesimpulan

Pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng membawa berbagai dampak negatif yang perlu dipertimbangkan secara serius sebelum melanjutkan proyek tersebut. Dari kerusakan lingkungan hingga ketidakadilan sosial dan risiko finansial, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dengan cermat potensi konsekuensi jangka panjang dari pembangunan ini. Dialog terbuka dengan masyarakat lokal serta studi dampak lingkungan yang mendalam harus dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan.